

**DIPLOMASI TIONGKOK TERHADAP AMERIKA SERIKAT
DALAM PARIS AGREEMENT TAHUN 2015-2016**

Oleh:

Ayatullah Komeini

(ayatullah.komeini@student.unri.ac.id)

Pembimbing : H.Faisyal Rani, S.IP, MA.

Bibliografi : 10 Jurnal, 38 Buku, 25 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research describes the China's diplomacy in a global climate change agreement. This research will focus on how China's diplomacy in paris climate change agreement towards the United States. This study interesting because describe about the diplomatic efforts of China as developing country and the world's biggest emitter of carbon dioxide towards United States as developed country in global agreement on climate change.

Climate change is recognized as a threat to international peace and security. The Paris Agreement marks a global commitment to tackling climate change and to reduction greenhouse gas in the world. I argue that diplomacy plays a significant role in process of climate treaty making. China's diplomacy as a developing countries toward the United States in the paris agreement has affected the United States policy in global climate agreement from convenient country towards committed country.

China's Diplomacy in paris agreement has resulted ratification of the United States through joint ratification in China. For the first time, an international agreement to reduce greenhouse gas emissions includes contributions from all of the major emitting countries and, indeed, a large majority of the countries of the world.

Keywords: Diplomacy, China, United States, Global Climate Change, Paris Agreement

I. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi mengenai diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam perjanjian perubahan iklim global (*paris agreement*). Studi ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisis adalah diplomasi Tiongkok sebagai negara dengan status *non annex I* dan *emitter* karbon terbesar

pertama di dunia terhadap negara maju dalam isu perubahan iklim yaitu Amerika Serikat sebagai negara *Annex I* dan *emitter* karbon terbesar kedua di dunia.

Data pada tahun 2014 memperlihatkan *the six largest emitting countries* yaitu Tiongkok 30%, Amerika Serikat 15 %, Uni Eropa 9,6 %, India 6,6

%, Rusia 5,0 % dan Jepang 3,6 %.¹ Tiongkok dan Amerika menempati posisi pertama dan kedua dengan jumlah keduanya 45 % dari total emisi karbon. Perubahan iklim yang mengancam kamanan lingkungan internasional membuat negara-negara dunia berpikir untuk mengatasinya.

Negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang dianggap menjadi aktor kunci dalam memecahkan persoalan lingkungan internasional (keamanan non-tradisional). Usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara dunia dalam mengatasi perubahan iklim diantaranya membentuk *kyoto protocol* dan *copenhagen accord*. Namun, belum menunjukkan keberhasilan dan komitmen dari negara dunia terutama Amerika Serikat.

Terkait dengan isu perubahan iklim global baru-baru ini, telah diadakan pertemuan internasional (COP 21) tanggal 30 November sampai 13 Desember 2015 di Paris Perancis.² Setelah terjadi dialog dan negosiasi yang cukup kuat dalam pertemuan tersebut, akhirnya berhasil menyepakati sebuah keputusan dan kesepakatan bersejarah yaitu menyepakati pembangunan rendah emisi untuk solusi masalah perubahan iklim global yaitu *Paris Agreement*.³

Kesepakatan tersebut merupakan *milestone* pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati *Agreement* yang *legally binding* menggantikan *kyoto*

protocol. *Paris Agreement* merupakan pencapaian tertinggi negosiasi satu dekade terakhir dunia internasional untuk pengaturan upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim.

Ancaman perubahan iklim menjadi sebuah isu keamanan lingkungan (*environmental security*) yang diistilahkan sebagai *non traditional security* dalam hubungan internasional. Isu ini layak dikaji salah satunya melalui pendekatan teori diplomasi dalam hubungan antar bangsa (internasional).

Isu perubahan iklim tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup semata, tetapi isu ini juga dapat mempengaruhi ke bidang lainnya seperti politik, ekonomi, pertahanan keamanan, kesehatan, kehutanan, dan berbagai bidang lainnya. Karena itu, agar masalah lingkungan hidup tidak berdampak buruk bagi sektor-sektor lainnya, maka pemerintah perlu segera mengambil inisiatif untuk mengatasinya.

Diplomasi merupakan faktor yang memberikan signifikansi dalam penetapan *paris agreement*. Dalam Hubungan Internasional (HI) sampai saat ini dikenal berbagai istilah dalam berdiplomasi. Diantaranya ialah *ping pong diplomacy*, *gunboat diplomacy*, *coercive diplomacy*, *public diplomacy*, *shuttle diplomacy*, *human right diplomacy* dan *climate diplomacy*. Sedangkan metode diplomasi diantaranya adalah konferensi, konvensi, negosiasi, mediasi dan lain sebagainya.

Hubungan antar negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, diplomasi menjadi kompetensi inti. Intensitas dari hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat ditandai dengan hubungan yang berfluktuasi.

Didalam sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat selalu menunjukkan sikap kurang bersahabat terhadap kesepakatan-kesepakatan perubahan iklim

¹ Jos G.J.Olivier, et al, 2015. *Trends In Global Co2 Emissions: 2015 Report*. Den Haag: Pbl Netherlands Environmental Assessment Agency Publisher. Hal 13.

²<<http://www.theguardian.com/Environment/2015/Sep/03/Breakthrough-Us-China-Agree-Ratify-Paris-Climate-Change-Deal>>, Diakses pada 2 September 2016 Pukul 16.43 Wib.

³<<http://www.mongabay.co.id/2015/12/13/Moment-Bersejarah-Paris-Agreement-Akhirnya-Disepakati-Dalam-Konferensi-Perubahan-Iklim-Cop-21-Paris/>>, Diakses pada 2 September 2016 Pukul 08.00 Wib.

sebelumnya. Untuk itu Tiongkok membangun diplomasi dengan Amerika Serikat mewakili *developing country* menuju pembangunan rendah karbon.

Setelah melakukan upaya-upaya diplomasi, secara mengejutkan Amerika Serikat sebagai negara *annex I* dengan emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia mengumumkan secara resmi sebuah kejadian langka yaitu melakukan ratifikasi terhadap perjanjian perubahan iklim dalam hal ini *paris agreement*.

Penulis menggambarkan kerangka pemikiran bahwa isu perubahan iklim mengancam kemananan lingkungan internasional. Kemudian dunia internasional melakukan usaha untuk mengatasinya. Diantara usaha yang dilakukan adalah membentuk suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan nama *Paris Agreement*.

Di dalam *paris agreement* ada dua aktor kunci yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan diplomasi. Sehingga AS yang belum pernah meratifikasi perjanjian tentang lingkungan akhirnya meratifikasi perjanjian terbaru yaitu *paris agreement*. Peristiwa tersebut akan penulis kaji dilihat dari teori diplomasi dalam ilmu hubungan internasional.

Perubahan iklim yang menjadi masalah global akan penulis kaji dari sudut pandang diplomasi dalam hubungan antar negara (internasional) khususnya antara Tiongkok dan Amerika Serikat dengan pertanyaan utama yaitu bagaimana diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* tahun 2015-2016?

Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun atas tiga pondasi utama yakni, Perspektif *Green Thought* yang diarahkan oleh teori diplomasi dan menggunakan dua konsep utama penelitian yaitu *diplomacy* dan *agreement*. Secara teoritik, tiga pondasi

utama ini yang nantinya akan menjawab bagaimana diplomasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *paris agreement*.

Perspektif *Green Thought* dalam ilmu hubungan internasional merepresentasikan suatu tantangan fundamental pada pendekatan isu atau penyelesaian masalah terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup memang menjadi semakin penting dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Perspektif *green thought* ini akan menjadi bingkai (*frame*) dalam melihat bagaimana tindakan Tiongkok yang dikaji melalui teori diplomasi.

Penulis menggunakan tingkat analisis sistem negara dalam penelitian ini. Dalam tingkat analisis sistem negara, penelaahan difokuskan pada proses pembuatan keputusan dan kesepakatan tentang hubungan internasional yaitu diplomasi dalam politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh.

Diplomasi adalah aplikasi dari taktik dan kecerdasan untuk memimpin hubungan luar negeri antara pemerintah dari negara-negara yang berdaulat.⁴ Diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kualitas *power*, pemerintahan, isu-isu internasional dan strategi yang digunakan oleh negara bersangkutan dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian kepentingan nasionalnya.

Diplomasi bisa dijadikan alat untuk bagaimana proses tawar-menawar bisa berjalan sebaik mungkin. Menurut Hans J Morgenthau, diplomasi punya empat tugas: *Pertama*, menetapkan tujuan berdasar kekuatan objektif dan kemampuan yang tersedia untuk mencapainya. *Kedua*, menilai tujuan-tujuan dan kekuatan negara lain.

⁴ Sir Ernest Satow dalam S.L Roy, 1995. Diplomasi. PT.Raja Grafindo: Jakarta. Hal. 6.

Ketiga, menetapkan seberapa jauh tujuan yang berbeda cocok satu dengan yang lainnya. *Keempat*, menggunakan sarana yang tepat dalam mencapai tujuan.⁵ Diplomasi merupakan salah satu instrumen prioritas dalam kebijakan luar negeri dan mewarnai dinamika politik internasional.

Penulis akan menggunakan teori dari Nick Mabey, Liz Gallagher dan Camilla Born tentang diplomasi iklim. Menurut beliau bahwa penerapan diplomasi untuk masalah perubahan iklim global sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk membentuk dan membingkai perjanjian internasional.

Tidak ada negara yang bisa mengontrol resiko perubahan iklim sendirian. Diplomasi iklim bisa menjadi sebuah instrumen penting bagi negara berkembang untuk mempengaruhi negosiasi perubahan iklim internasional.

Dalam praktik diplomasi iklim memerlukan tiga kemampuan inti supaya efektif yaitu:⁶

1. *Know Yourself*, yaitu kemampuan untuk mengembangkan tindakan nasional berdasarkan pemahaman tujuan tentang bagaimana pengaruh dan efek perubahan iklim terhadap kepentingan nasional.
2. *Know the Other*, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis kepentingan, kendala dan kapasitas aktor lain serta bagaimana mereka memandang aksi dan posisi kita.
3. *Capacity to Influence*, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan prioritas nasional kedalam politik dan

⁵ Hans J Morgenthau, 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Hal. 617.

⁶ Nick Mabey, Liz Gallagher & Camilla Born, 2013. *Understanding Climate Diplomacy 'Building Diplomatic Capacity and Systems to Avoid Dangerous Climate Change'*. London: E3g. Hal 35.

saluran diplomatik. Penggunaan diplomasi dan kemampuan untuk mempengaruhi dan membangun kepercayaan strategis serta membingkai perdebatan melalui pesan pribadi dan publik (*private and public messaging*).

Pertemuan bilateral menjadi kunci diplomasi iklim. Pertemuan dalam diplomasi iklim sering dilakukan diluar rezim seperti *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC). Diplomasi iklim dimulai dengan praktik bilateral. Contohnya adalah seperti yang dilakukan Tiongkok melalui presiden Xi Jinping Terhadap Amerika Serikat yang pada waktu itu presidennya Barack Obama pada persetujuan iklim di Paris.

Argumen utama dalam penelitian ini adalah diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *paris agreement* adalah dengan cara menggunakan *Climate Diplomacy* (Diplomasi Iklim). Diplomasi iklim adalah praktek dan proses menciptakan rezim perubahan iklim internasional dan memastikan pengoperasian yang efektif.⁷

Dalam diplomasi iklim mempertemukan antara kepentingan nasional dan kerjasama internasional. Sebuah usaha negosiasi iklim membentuk suatu sistem yang komprehensif untuk menanggulangi perubahan iklim. supaya hasilnya (*outcomes*) sesuai dengan prioritas negara.

Diplomasi merupakan pondasi dari *international agreement* dan efektivitasnya. Diplomasi iklim bisa membantu *developing country* dalam negosiasi internasional. Teori diplomasi dalam kerangka *green thought* mengantarkan Tiongkok pada sebuah tindakan dimana *climate diplomacy*.

⁷ *Ibid*, Hal 23.

Diplomasi iklim terkait isu iklim dikarakteristikan sebagai *assymetric power distribution* (distribusi kekuasaan asimetris) atau disebut juga *stucturalist paradox*.⁸ Bagaimana sebuah negara *non Annex I* berdiplomasi dengan negara *Annex I* dan menghasilkan sebuah *agreement* sebagai kesepakatan internasional.

Paradoks tersebut memperlihatkan bahwa: *the traditional concept of power as negotiated outcomes do not always seem to flow from power ditribution*.⁹ Konsep tradisional kekuatan sebagai hasil negosiasi tidak selalu mengalir dari distribusi kekuasaan.

Konsep diplomasi iklim dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana diplomasi Tiongkok sebagai negara dengan emisi karbon terbesar dengan status *non-annex I* terhadap Amerika Serikat dengan status *Annex I* untuk ikut andil bersama dengan emisi nomor dua terbesar di dunia.

Diplomasi iklim menangani isu perubahan untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara.¹⁰

Sehingga diplomasi iklim dapat mencakup dari persoalan pencemaran udara, limbah, pencemaran laut, bioteknologi dan keamanan hayati, pemukiman, pembangunan berkelanjutan, sumber daya air, energi dan lain-lain. Kebijakan luar negeri adalah “*what you*

do”. Sedangkan diplomasi yaitu “*how you do it*”. Diplomasi tidak terlepas dari proses-proses negosiasi, *bargaining* dan fraksional. Semua proses akan dilihat dalam rangkaian antara input, proses dan *outcome*.

Perubahan iklim yang merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*) menjadi isu lingkungan yang menjadi tantangan dunia internasional. Fenomena global ini muncul akibat meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca sehingga suhu bumi mengalami peningkatan.

Respon politik internasional terhadap perubahan iklim dimulai dengan penetapan konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang dibentuk pada tanggal 21 Maret 1994.

Sampai saat ini sudah ada 194 negara yang meratifikasi konvensi tersebut yang kemudian dinamakan *parties of the convention*.¹¹ Untuk menerapkan *agreement* ada badan yang dinamakan COP (*Conference of the parties*). COP merupakan *the supreme decision making of the convention*.

Untuk *paris agreement* dinamakan *Conference Of The Parties Serving As The Meeting Of The Parties To The Paris Agreement* (CMA). Implementasi dari *paris agreement* serta pengambilan keputusan di bicarakan pada CMA ini.

Negosiasi terkait perubahan iklim global adalah sebuah pilihan dan peluang bagi Tiongkok untuk membentuk mutual understanding. Dan pada akhirnya bisa meratifikasi perjanjian internasional secara bersama (*joint ratification*) dengan Amerika Serikat di Tiongkok.

⁸ Castro P Betzold & Weiler, F, 2012. *Aosis In The Unfccc Negotiations: From Unity To Fragmentation? Climate Policy*. Hal. 591–613.

⁹Weiler, F, 2012. *Determinants Of Bargaining Success In Climate Change Negotiations. Climate Policy*, Hal. 8. Tersedia Di <https://kar.kent.ac.uk/54937/3/Weiler_Success_Preprint.Pdf>, Diakses pada 4 November 2016 Pukul 9.10 Wib.

¹⁰ *Ibid*

¹¹<[Http://unfccc.int/Essential_Background/Convention/Items/6036.Php](http://unfccc.int/Essential_Background/Convention/Items/6036.Php)>, Diakses pada 25 Januari 2017 Pukul 9.32 Wib.

Penulisan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini menganalisis data-data dengan cara melihat dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena.¹² Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* tahun 2015-2016.

Jika ditinjau dari pengolahan data menuju simpulan maka sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan induktif, yakni menggambarkan kenyataan dan situasi serta dianalisis berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, namun juga melalui interpretasi tentang data tersebut.

Selanjutnya, tulisan ini akan dikembangkan melalui teknik mengumpulkan dan mengkompilasi data dengan riset kepustakaan (*library research*). Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi yang sah dapat digunakan menelaah secara sistematis. Dengan demikian, data-data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder sebagai pendukung untuk kepentingan analisis yang bersumber dari dokumentasi dan publikasi.

Bentuk data-data tersebut dapat ditemui dari berbagai literatur, baik buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, penerbitan surat kabar, berbagai database dan internet yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan pertimbangan bahwa sumber tersebut

mencerminkan isu diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat yang dapat menjadi referensi yang sangat baik untuk membantu melakukan analisis diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam *Paris Agreement*.

Penelitian ini akan dimulai melalui teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber pertama atau kedua. Sumber pertama (primer) bisa didapat melalui pidato dan pernyataan elit pemerintahan Tiongkok dan Amerika Serikat seperti presiden Xi Jinping dan Barack Obama di dalam dan luar negeri.

Kemudian sumber kedua (sekunder) bisa diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, mencari informasi yang relevan dari internet, baik itu buku gratis, data dari situs-situs *think tank*, situs resmi negara dan organisasi tertentu, jurnal *online* ataupun media massa elektronik lainnya yang sah (dapat dipercaya).

Penelitian ini berfokus pada diplomasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam Isu Lingkungan khususnya terkait *Paris Agreement* pada tahun 2015-2016. Penulis memilih tahun tersebut karena pada saat tahun 2015 terbentuk dan disepakatinya *Paris Agreement*.

Kemudian baru pada tahun 2016 Tiongkok bersama Amerika Serikat meratifikasi kesepakatan tersebut melalui *joint ratification* yang dilaksanakan di Tiongkok. Namun, pembatasan tahun ini bukanlah suatu hal yang mutlak karena konstelasi hubungan diplomatik kedua negara dan dinamika perubahan iklim global diluar tahun tersebut juga akan disinggung untuk membantu proses analisis dalam penelitian ini.

¹² Catherine Marshall & Gretchen B Rossman, 1994. *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. California: Sage Publication. Hal. 41.

II. ISI

Tiongkok sebagai emisi karbon terbesar di dunia menjadi perhatian karena dianggap punya tanggung jawab atas emisinya.¹³ Namun, disisi lain Tiongkok mempunyai argumen lain bahwa negara majulah yang harus bertanggung jawab lebih banyak. Maka Tiongkok melakukan negosiasi diplomasi dengan negara maju khususnya Amerika Serikat sebagai emisi karbon terbesar kedua dibawah Tiongkok.

Pada masa presiden Xi Jinping, Tiongkok melakukan berbagai upaya dalam merespon isu perubahan iklim global. Xi Jinping yang sebelumnya merupakan wakil presiden pada tahun 2008 dan sekarang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Pada 15 November 2012 Xi Jinping terpilih sebagai presiden Tiongkok ke lima menggantikan Hu Jintao.

Diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok seperti menggelar pertemuan bilateral dengan AS yang dimaksudkan menyelesaikan masalah lingkungan internasional khususnya perubahan iklim. Kesepakatan Paris yang mengadopsi prinsip *common but differentiated responsibilities*, memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Terutama Amerika Serikat yang dalam konvensi disebut sebagai negara *Annex I* dan emitter terbesar kedua setelah Tiongkok, mempunyai tanggung jawab lebih dalam upaya global untuk memitigasi emisi gas rumah kaca.

Konvensi iklim membagi negara dunia menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama disebut dengan Annex I yaitu terdiri dari negara industri maju yang telah menjadi anggota OECD (*Organisation for economic co-operation and development*)

ditambah dengan negara-negara dalam transisi ekonomi seperti Federasi Rusia, Negara Baltik, Negara Eropa Timur.¹⁴

Kelompok Non-Annex I terdiri dari negara sedang berkembang (*developing country*)¹⁵. Negara-negara berkembang diakui oleh konvensi sebagai yang rentan terhadap dampak yang merugikan dari perubahan iklim termasuk negara dengan pesisir rendah. Konvensi menekankan agar diberikan perlakuan khusus seperti transfer teknologi dan asuransi.

Tiongkok mengunjungi Amerika pada tanggal 22-25 September 2015

Masalah lingkungan menjadi salah satu isu utama di dalam hubungan internasional kontemporer. Dua bulan sebelum diadakan *The Conference Of The Parties To The United Nations Framework Convention On Climate Change* ke 21 (COP 21) di Paris Tiongkok mengunjungi AS.

Selama kunjungan, President Xi Jinping dan Presiden Obama telah berbicara secara mendalam, jujur dan konstruktif. Kedua belah pihak mencapai konsensus luas dan tiba pada serangkaian hasil yang penting.

Menurut *briefing* yang diberikan oleh para pejabat dari kementerian luar negeri, konsensus utama dan hasil-hasil yang dicapai oleh kedua belah pihak adalah menghasilkan 49 poin kesepakatan yang dinamakan *China-US Joint Presidential Statement on Climate Change*.

Pada poin ke 46 pada bab tentang *global challenge* terdapat pernyataan bahwa kedua negara akan bekerjasama dalam menyukseskan konferensi perubahan iklim Paris. Memperkuat

¹³ Robert N Stavins & Robert C Stowe, 2016. *The Paris Agreement And Beyond: International Climate Change Policy Post 2020*. Cambridge: Harvard Project On Climate Agreement.

¹⁴ <[Http://Unfccc.Int/Parties_And_Observers/Items/2704.Php](http://Unfccc.Int/Parties_And_Observers/Items/2704.Php)>, Diakses pada 25 Januari 2017 Pukul 12.00 Wib.

¹⁵ *Ibid*.

kerjasama dan koordinasi untuk pembangunan rendah karbon berkelanjutan.

Kedua belah pihak melampirkan sangat penting untuk pertukaran dan kerjasama energi bersih (*clean energy*). Dalam pertemuan tersebut sepenuhnya mengakui kolaborasi dari Tiongkok-AS *Clean Energy Research Center (CERC)*.¹⁶ Untuk menerapkan konsensus yang telah disepakati oleh kedua Presiden secara bersama-sama mengembangkan energi bersih dan mengatasi tantangan perubahan iklim.

Sebagai dua negara penghasil gas karbon terbesar, diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat akan menjadi sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari pembuatan kesepakatan.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara maju dan dikategorikan dalam *annex 1*, Tiongkok termasuk dalam kategori negara *Non-Annex 1* berdasarkan kesepakatan dari UNFCCC. Hal ini terjadi karena meskipun Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun secara per kapita masih banyak dari penduduknya yang hidup dengan penghasilan dibawah 1,25 dollar per hari sehingga mereka meminta agar dimasukkan ke dalam kategori negara berkembang.¹⁷

Upaya diplomasi Tiongkok terhadap Amerika Serikat melalui pertemuan bilateral di Amerika Serikat.

¹⁶ Full Text: Outcome list of President Xi Jinping's state visit to the United States, Diakses dari <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1300771.shtml> pada 24 Januari 2017 pukul 15.30 wib.

¹⁷ Action For Our Planet, Top 10 Polluting Countries, tersedia online di <<http://www.actionforourplanet.com/#/Top-10-Polluting-Countries/4541684868>>, Diakses 25 Januari 2017 PKL 22.19 wib.

untuk membuat kembali perjanjian lingkungan internasional yang efektif. Pengakuan akan persoalan ini sebagai masalah global adalah untuk mendorong terwujudnya kerjasama internasional.

Dalam berbagai perundingan, baik sebelum terbentuknya konvensi perubahan iklim maupun untuk penjabaran lebih lanjut konvensi tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama, terdapat perbedaan pandangan dan posisi antar negara-negara berkembang umumnya dan negara-negara maju.

Tiongkok Melakukan Pertemuan pada 30 November 2015 di Paris.

Pertemuan ini dilakukan untuk berdialog dengan Obama sebelum dimulainya *The Conference Of The Parties To The United Nations Framework Convention On Climate Change* ke 21 (COP 21) di Paris.

COP merupakan asosiasi para pihak yang meratifikasi konvensi. Menurut konvensi, COP merupakan badan tertinggi konvensi yang berwenang membuat keputusan. COP bertanggung jawab menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan utama konvensi.

Karena itu, secara rutin COP meninjau komitmen para pihak melalui peninjauan komunikasi nasional dan pengalaman para pihak menerapkan kebijakan nasionalnya terkait isu perubahan iklim. Xi mengatakan pada Obama bahwa :

“our country should step up efforts to reach a climate change deal. As the Paris climate summit negotiations near their end, Tiongkok and the United States must strengthen coordination with all parties, and work together to ensure the Paris climate summit reaches an accord as scheduled”.¹⁸

¹⁸ Michael Martina & Sui-Lee Wee, 2015. *China's President Xi And Obama Discuss Climate Change By Phone*. Diakses dari

Hal diatas adalah pembicaraan Xi dengan Obama *handphone*. Kemudian pidato yang disampaikan oleh Xi Jinping pada *opening ceremony* COP21 menyampaikan bahwa:

“Tackling climate change is a shared mission for mankind. All eyes are now on Paris. Let us join hands to contribute to the establishment of an equitable and effective global mechanism on climate change, work for global sustainable development at a higher level and bring about new international relations featuring win-win cooperation”.¹⁹

Inti dari yang disampaikan Xi Jinping ialah bahwa mengatasi perubahan iklim merupakan misi bersama bagi umat manusia. Xi mengajak untuk bergandengan tangan dalam berkontribusi pada pembentukan mekanisme perubahan iklim global yang adil dan efektif. Beliau juga menekankan agar negara-negara dunia bekerjasama untuk pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global dan membentuk hubungan antar bangsa yang bersifat *win-win cooperation*.

Tantangan Negosiasi pada Pertemuan di Paris (COP 21)

Perbedaan kepentingan dari setiap negara menjadi hambatan dalam bernegosiasi di Paris karena perubahan iklim dan kebijakan untuk mengurangi dampaknya akan memiliki pengaruh ekonomi dan lingkungan yang sangat besar terutama negara maju.

<<http://www.Reuters.Com/Article/Us-Climatechange-Summit-China-Xi-Iduskbn0tu0fi20151211>>, Pada 24 Januari 2017 Pkl 21.55 Wib.

¹⁹*Full Text Of President Xi's Speech At Opening Ceremony Of Paris Climate Summit*, diakses dari <http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-2/01/content_22592469.htm> pada 25 Januari 2017 pukul 08.45 wib

Perdebatan mengenai komitmen pengurangan emisi yang mengikat secara hukum dan tegas dalam penentuan waktu dan bantuan dan dukungan dari negara maju terhadap negara berkembang dan negara-negara kecil kepulauan.

Menurut negara berkembang, *common but differentiated responsibility* berarti bahwa semua negara memiliki tanggung jawab namun berdasarkan emisi historis, negara maju mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk melakukan pengurangan emisi.

Belajar dari kegagalan pertemuan di *Copenhagen* maka untuk itu Tiongkok sebagai *emitter* terbesar sekaligus dengan statusnya sebagai negara *non annex I* dan *the largest developing country* melakukan upaya-upaya diplomasi dalam mengambil sikap atas isu tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh Tiongkok adalah melakukan berbagai pertemuan dengan Amerika Serikat sebagai *annex I* dan *the biggest developed country*.

Diplomasi perubahan iklim hingga pertemuan paris (COP 21) memang menunjukkan bahwa prinsip *common but differentiated responsibility* diterjemahkan sebagai tanggung jawab negara maju untuk melakukan pengurangan emisi.

Dalam perdebatan yang berkembang, negosiasi perundingan tidak menghadirkan *prinsip common but differentiated responsibility* sebagai pembagian beban yang adil berbasis tanggung jawab historis. Amerika misalnya mendorong interpretasi prinsip tersebut dengan menekankan *common responsibility* atau tanggung jawab bersama sebagai prioritas sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab.

Dalam soal perubahan iklim Tiongkok tidak hanya mendasarkan pada kepentingan sempit atau nasional melainkan lebih luas yaitu kepentingan

negara berkembang dan global. Pentingnya kepentingan yang lebih luas disebutkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidatonya. Substansi diplomasi iklim Tiongkok dalam melakukan lobi, negosiasi dan berargumentasi yaitu:

Pertama, tentang kerjasama negara maju dan berkembang dalam mengelola permasalahan perubahan iklim. *Kedua*, prinsip dengan azas *common but differentiated responsibilities*. *Ketiga*, negara maju harus membantu beban yang diemban negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui bantuan pendanaan dan alih teknologi.

Tiongkok telah mencoba menyeimbangkan makna dari prinsip *common but differentiated responsibility* dalam praktik diplomasi yang dilakukan. Tiongkok telah mampu memainkan tiga kemampuan yaitu *Know the Other*, *Know Yourself* dan *Capacity to Influence*. Sehingga bisa memimpin negara berkembang untuk mempengaruhi negara maju Amerika Serikat dalam membentuk dan menyepakati kesepakatan suatu perjanjian.

Setelah terjadi dialog dan negosiasi yang cukup kuat dalam pertemuan tersebut, akhirnya berhasil menyepakati sebuah keputusan dan kesepakatan bersejarah yaitu menyepakati pembangunan rendah emisi untuk solusi masalah perubahan iklim global yaitu Paris Agreement.²⁰

Kesepakatan tersebut merupakan milestone pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati Agreement yang *legally binding* menggantikan *kyoto protocol*.

Presiden Tiongkok berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 31 Maret 2016 di Washington Convention Center.

Pada pertemuan ini menghasilkan *the third joint statements on climate change cooperation and action*. Inti dari poin yang dihasilkan ialah kedua negara komitmen akan menandatangani dan mengambil langkah konkrit untuk mengimplementasikan *agreement* yang disepakati di Paris. Isi dari pertemuan ini menghasilkan lima poin kesepakatan yaitu:²¹

Pertama, Tiongkok dan Amerika Serikat akan memberikan contoh dalam pembangunan rendah karbon. Kedua, meratifikasi *paris agreement* sesegera mungkin. Ketiga, mendukung KTT G20 yang akan dilaksanakan di Tiongkok. Keempat, berkomitmen untuk mengambil langkah nyata untuk melaksanakan yang telah disepakati di Paris. Kelima, upaya bersama Tiongkok dan Amerika Serikat dalam menangani isu perubahan iklim.

Kedua negara berhasil memanfaatkan momentum ketika di waktu yang bersamaan dua negara ini mempunyai komitmen yang sama untuk bekerja sama dan rela untuk mengambil risiko dengan menguatkan komitmen di level bilateral. Penguatan komitmen yang terjadi dalam kerjasama bilateral ini pada akhirnya adalah cerminan keberhasilan diplomasi iklim.

Tiongkok mulai mengubah preferensi tindakan dalam isu lingkungan internasional di dalam negosiasi UNFCCC ke dalam lingkup negosiasi yang lebih kecil di tingkat bilateral. Pada akhirnya Tiongkok mulai menggeser strategi dari negosiasi multilateral di UNFCCC ke

²⁰<<http://www.Mongabay.Co.Id/2015/12/13/Moment-Bersejarah-Paris-Agreement-Akhirnya-Disepakati-Dalam-Konferensi-Perubahan-Iklim-Cop-21-Paris/>>, Diakses pada 2 September 2016 Pukul 08.00 Wib.

²¹*China-U.S.Joint Presidential Statement on Climate Change* diakses dari <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1353094.shtml> pada 24 Januari 2017 pkl 15.20 wib.

negosiasi yang lebih kecil di tingkat bilateral dengan diplomasi iklim.

Adanya perubahan dalam cara melihat atau membingkai negosiasi membuat kedua negara mulai mengubah pendekatan dalam isu perubahan iklim. Sehingga Tiongkok mengajak Amerika Serikat untuk berunding secara bilateral dalam isu perubahan iklim. Sehingga mampu membentuk komitmen bersama di level internasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Pertemuan di Beijing Tiongkok pada tanggal 7 Juni 2016

Pertemuan di Beijing membicarakan implementasi *paris agreement* yang disepakati pada tahun 2015 di Paris. Dalam menangani isu perubahan iklim, pemerintah Tiongkok mempromosikan bahwa telah dibentuk *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA) sebagai *the lead agency*.

Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan untuk koordinasi strategi nasional agar apa yang menjadi prioritas dari pemerintah Tiongkok dapat diperjuangkan melalui forum-forum negosiasi baik di tingkat domestik maupun internasional.

Perundingan di Beijing juga membicarakan persoalan-persoalan antar negara yang terkait dengan masalah perubahan iklim, misalnya masalah agenda prioritas pembangunan, keragaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, perbedaan kemampuan, pengaruh negara, kompetisi antar negara dan lain-lain.

Prinsip *common but differentiated responsibilities* membuat negara *annex I* keberatan. Sehingga ada analisis bahwa kesepakatan negosiasi dalam *agreement* akan sulit untuk dicapai dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk berlaku (*entry into force*). Hal ini didasarkan pada pengalaman pemberlakuan Protokol Kyoto, yang diadopsi pada 11 Desember

1997, namun baru bisa berlaku (*entry into force*) di tahun 2005. Hal tersebut jadi pertimbangan pada negosiasi *paris agreement* bahwa tahun 2020 menjadi tenggang waktu yang disepakati bersama untuk memberlakukan.

Tiongkok bertemu dengan AS pada 3 September 2016 di Hangzhou Tiongkok

Diplomasi yang dilakukan Tiongkok berlanjut dengan pertemuan pada sela pertemuan *Group of 20 (G20) summit*. Pertemuan ini membahas tentang hubungan kedua negara, isu regional dan internasional. Mengembangkan hubungan bilateral dengan prinsip *non-conflict, non confrontation, mutual respect, win-win cooperation* dan meningkatkan *mutual trust*.

Penerapan diplomasi untuk masalah perubahan iklim global sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk membentuk dan membingkai perjanjian internasional. Tidak ada negara yang bisa mengontrol resiko perubahan iklim sendirian. Pertemuan bilateral menjadi kunci diplomasi iklim.

Diplomasi iklim bisa menjadi sebuah instrumen penting bagi negara berkembang untuk mempengaruhi negosiasi perubahan iklim internasional. Tiga kemampuan yang dikatakan dalam diplomasi iklim bisa dikelola dengan baik oleh Tiongkok. Tiongkok bisa mengembangkan tindakan nasional berdasarkan pemahaman tujuan tentang bagaimana pengaruh dan efek perubahan iklim terhadap kepentingan nasional.

Kemudian Tiongkok mampu mengumpulkan dan menganalisis kepentingan, kendala dan kapasitas serta bagaimana memandang Amerika Serikat dan posisinya. Dimana Tiongkok mampu untuk mengintegrasikan prioritas nasional kedalam politik dan saluran diplomatik.

Diplomasi iklim dimulai dengan praktik bilateral. Tiongkok melalui presiden Xi Jinping melakukan diplomasi terhadap Amerika Serikat yang pada waktu itu presidennya Barack Obama pada persetujuan iklim di Paris.

Diplomasi merupakan pondasi dari *international agreement* dan efektivitasnya. Diplomasi iklim bisa membantu *developing country* dalam negosiasi internasional. Penggunaan diplomasi dan kemampuan oleh Tiongkok telah bisa mempengaruhi dan membangun kepercayaan strategis serta membingkai perdebatan melalui pesan pribadi dan publik (*private and public messaging*) dengan Amerika Serikat.

Ratifikasi adalah tindakan suatu negara menyatakan kesediaanya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional.²² Salah satu bentuk dari perjanjian internasional adalah *agreement* (persetujuan). Ratifikasi dilakukan setelah proses perundingan (*negotiation*) dan penandatanganan (*signature*). Penandatanganan baru memberikan persetujuan terhadap teks perjanjian dan belum mengikat negara-negara penandatanganan. Bila telah menandatangani tapi belum meratifikasi berarti negara tersebut belum terikat. Perjanjian internasional akan mengikat setelah dilakukan ratifikasi oleh negara, biasanya dibuat oleh kepala negara yang berkepentingan.

Tiongkok dan Amerika Serikat harus menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan usaha untuk memberantas kemiskinan. Kedua negara harus menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap lima tahun sekali dan harus menyampaikan komitmen

dan kontribusi nasionalnya (*nationally determined contribution*).

Tiongkok lebih akomodatif dalam skema bantuan dan teknologi dalam perundingan perubahan iklim. Selain itu, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban yang sama dengan negara maju untuk mengurangi emisi.

Atas dasar prinsip “Sama, Namun Tanggung Jawab Berbeda” menambah *capacity to influence* Tiongkok dengan posisinya sebagai negara *developing country*. Dalam diplomasi terkait perubahan iklim, Tiongkok cukup keras memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Tiongkok dan Amerika Serikat mewakili 45 persen dari emisi gas rumah kaca global. Ratifikasi dua negara tersebut akan menambah momentum kekuatan untuk mengarahkan *Paris Agreement* segera berlaku. Ini menandai kemajuan penting dan signifikan dalam menangani masalah perubahan iklim global.

Sebelum ratifikasi oleh Tiongkok dan Amerika Serikat sudah ada 24 negara yang meratifikasinya namun baru mewakili 1,08 persen dari emisi global, padahal yang menandatangani sudah 180 negara. Ratifikasi yang dilakukan Tiongkok dan Amerika Serikat bertambah menjadi 26 negara dengan representasi emisi 46,08 persen.

Setelah ratifikasi kedua negara maka akan memberikan pengaruh dan mendorong negara lainnya untuk mengikuti.²³ Hal ini dibuktikan dengan diikutinya ratifikasi oleh 92 negara lainnya

²² Rosmi Hasibuan, 2002. *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal 6.

²³Eliza Northrop & Melisa Krmjaic, 2016. *Us and China Join Paris Agreement, Bringing It Much Closer To Taking Effect*. Diakses dari <<http://www.wri.org/2016/09/Us-And-China-Join-Paris-Agreement-Bringing-It-Much-Closer-Taking-Effect>> Pada 30 Januari 2017 Pukul 14.00 Wib.

seperti diantaranya Uni Eropa, India, Jepang dan Kanada.

Ratifikasi yang dilakukan Tiongkok dan Amerika Serikat bertambah menjadi 26 negara dengan representasi emisi 46,08 persen. Setelah ratifikasi kedua negara memberikan pengaruh dan mendorong negara lainnya untuk mengikuti. Hal tersebut dibuktikan dengan diikutinya ratifikasi oleh 92 negara lainnya seperti diantaranya Uni Eropa, India, Jepang dan Kanada.

Paris agreement telah disahkan dan diberlakukan (*entry into force*) menggantikan protokol Kyoto pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2016, dua bulan setelah ratifikasi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Berlakukannya *Paris Agreement* dinilai sebagai keberhasilan diplomasi antara negara *non annex I* dengan *Annex I* dalam negosiasi perubahan iklim global.

Tujuan *paris agreement* adalah menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan usaha untuk memberantas kemiskinan. Tujuan tersebut dilakukan melalui tiga usaha yang terdapat dalam isi dokumen *Paris Agreement Article 2*.²⁴ Pertama, membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industri dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga di bawah 1,5°C.

Kedua, peningkatan kemampuan untuk adaptasi terhadap efek perubahan iklim dalam produksi pangan. Ketiga, membuat alur keuangan yang konsisten menuju emisi gas rumah kaca yang rendah. Implementasi *paris agreement* dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* dan *respective capabilities* dalam kondisi perbedaan nasional.

²⁴<http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf> Diakses pada 2 September 2016 Pukul 21.46 Wib.

Setiap negara yang terlibat menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap lima tahun sekali dan harus menyampaikan komitmen dan kontribusi nasionalnya (*nationally determined contribution*). Dalam *Article 20 Paris Agreement* masa untuk meratifikasi bagi setiap negara dimulai tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017.²⁵

Kemudian dalam *Article 21* menyebutkan kesepakatan akan diberlakukan (*enter into force*) sebulan setelah lebih kurang 55 negara yang mewakili 55% emisi global meratifikasinya.²⁶ Berarti butuh usaha yang tinggi agar tercapai syarat pemberlakuannya.

Diplomasi iklim yang dijalankan Tiongkok terhadap Amerika Serikat bisa membantu memberikan titik temu dalam negosiasi iklim internasional. Pada pertemuan yang dilakukan di Beijing kedua negara akhirnya meratifikasi *paris agreement* melalui *joint ratification ceremony of the paris climate change agreement* bersama Tiongkok pada hari Sabtu, 3 September 2016 di Hangzhou Tiongkok.

III. Simpulan

Paris agreement merupakan contoh dari keberhasilan diplomasi iklim. Tiongkok dinilai melakukan strategi diplomasi iklim (*climate diplomacy*) dalam mempengaruhi perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam konvensi perubahan iklim global.

Diplomasi iklim dapat menjadi pilihan dan patut dipertimbangkan oleh suatu negara dalam menjalankan hubungan dengan negara lain. Diplomasi seperti ini harus lebih ditingkatkan karena sangat berguna bagi negosiasi menghadapi ancaman perubahan iklim.

²⁵*Ibid. hal 22.*

²⁶*Ibid. hal 23.*

Praktik Diplomasi iklim yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat bisa menemukan suatu konvergensi (titik temu) antara dua negara untuk dapat melihat ancaman terhadap bumi. Diplomasi iklim dalam isu ancaman keamanan lingkungan telah dapat mempererat hubungan bilateral Tiongkok dan Amerika Serikat dan mengantarkan pada keputusan ratifikasi.

Keberhasilan diplomasi iklim Tiongkok memberikan harapan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim melalui *paris agreement*. Hubungan antagonisme antara Tiongkok dan Amerika Serikat mulai berkurang. Tiongkok menyelenggarakan diplomasi iklim (*climate diplomacy*) melalui *bilateral meeting*.

Pertemuan di Paris menjadi pertemuan yang penting menghasilkan suatu persetujuan yang dikenal dengan *Paris Agreement* yang berisi mengenai langkah-langkah komprehensif yang perlu dilakukan negara-negara dalam mengatasi masalah lingkungan untuk mencegahnya terulang kembali. Diplomasi Tiongkok melalui *climate diplomacy* berhasil mempengaruhi Amerika Serikat dari arah *convenient country* menuju *committed* dan *lead country*.

IV. Rekomendasi

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar adanya penulisan skripsi yang mengembangkan dan menyempurnakan pembahasan tentang diplomasi Tiongkok dan Amerika Serikat dalam *paris agreement*. Praktik diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok bisa dicontoh oleh negara berkembang lainnya khususnya dalam isu perubahan iklim.

Masalah perubahan iklim telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan politik dan sosial di tataran domestik dan dunia global. Oleh

sebab itu, kerjasama antar negara dan juga masyarakat internasional menjadi penting untuk dilakukan guna merespon masalah perubahan iklim yang dihadapi saat ini.

Menjaga bumi dengan praktik diplomasi iklim yang baik merupakan pilihan yang bisa dan harus dipertimbangkan bagi setiap negara. Negara-negara yang mengikuti pertemuan konferensi di Paris dan meratifikasi hasilnya diharapkan untuk mempersiapkan diri dan memastikan bahwa mereka siap untuk melaksanakan hasil yang diharapkan yang disepakati dari pertemuan di Paris.

V. Referensi

Betzold, Castro P & Weiler, F, 2012. *Aosis In The Unfccc Negotiations: From Unity To Frag-Mentation?Climate Policy*.

Marshall, Catherine & Gretchen B Rossman, 1994. *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. California: Sage Publication.

G.J.Olivier, Jos, et al, 2015. *Trends In Global Co2 Emissions: 2015 Report*. Den Haag: Pbl Netherlands Environmental Assessment Agency Publisher.

Mabey,Nick, Liz Gallagher &Camilla Born, 2013. *Understanding Climate Diplomacy 'Building Diplomatic Capacity and Systems to Avoid Dangerous Climate Change'*. London: E3g.

Stavins, Robert N Stavins & Robert C Stowe, 2016. *The Paris Agreement And Beyond: International Climate Change Policy Post 2020*. Cambridge: Harvard Project On Climate Agreement.

Hasibuan, Rosmi, 2002. *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Roy, S.L 1995. *Diplomasi*. PT.Raja Grafindo: Jakarta.

Weiler, F, 2012. *Determinants Of Bargaining Success In Climate Change Negotiations*. *Climate Policy*, Hal. 8. Tersedia Di <https://kar.kent.ac.uk/54937/3/Weiler_Success_Preprint.Pdf>, Diakses pada 4 November 2016 Pukul 9.10 Wib.

Eliza Northrop & Melisa Krnjaic, 2016. *Us and China Join Paris Agreement, Bringing It Much Closer To Taking Effect*. Diakses dari <<http://www.wri.org/2016/09/Us-And-China-Join-Paris-Agreement-Bringing-It-Much-Closer-Taking-Effect>> Pada 30 Januari 2017 Pukul 14.00 Wib.

Michael Martina & Sui-Lee Wee, 2015. *China's President Xi And Obama Discuss Climate Change By Phone*. Diakses dari <<http://www.reuters.com/article/Us-Climatechange-Summit-China-Xi-Iduskbn0tu0fi20151211>>, Pada 24 Januari 2017 Pkl 21.55 Wib.

<http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf> Diakses pada 2 September 2016 Pukul 21.46 Wib.

<<http://www.theguardian.com/Environment/2016/Sep/03/Breakthrough-Us-China-Agree-Ratify-Paris-Climate-Change-Deal>>, Diakses pada 2 September 2016 Pukul 16.43 Wib.

<<http://www.mongabay.co.id/2015/12/13/Moment-Bersejarah-Paris-Agreement-Akhirnya-Disepakati-Dalam-Konferensi-Perubahan-Iklim-Cop-21-Paris/>>, Diakses pada 2 September 2016 Pukul 08.00 Wib.

Full Text: Outcome list of President Xi Jinping's state visit to the United States, Diakses dari <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1300771.shtml> pada 24 Januari 2017 pukul 15.30 wib.

Action For Our Planet, Top 10 Polluting Countries, tersedia online di <<http://www.actionforourplanet.com/#/Top-10-Polluting-Countries/4541684868>>, Diakses 25 Januari 2017 PKL 22.19 wib.

Full Text Of President Xi's Speech At Opening Ceremony Of Paris Climate Summit, diakses dari <http://www.chinadaily.com.cn/world/XiatendsParisclimateconference/2015-2/01/content_22592469.htm> pada 25 Januari 2017 pukul 08.45 wib

China-U.S.Joint Presidential Statement on Climate Change diakses dari <http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1353094.shtml> pada 24 Januari 2017 pkl 15.20 wib.

<<http://www.mongabay.co.id/2015/12/13/Moment-Bersejarah-Paris-Agreement-Akhirnya-Disepakati-Dalam-Konferensi-Perubahan-Iklim-Cop-21-Paris/>>, Diakses pada 2 September 2016 Pukul 08.00 Wib.

<http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php>, Diakses pada 25 Januari 2017 Pukul 12.00 Wib.

<http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php>, Diakses pada 25 Januari 2017 Pukul 9.32 Wib. *Unfccc Negotiations: From Unity To Frag-Mentation?Climate Policy*. Hal. 591-613.